



Ketimpangan sosial sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan dalam struktur masyarakat modern

Fina Maghfiroh¹

¹Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 23/12/2025

Direvisi 20/01/2026

Diterima 23/02/2026

Diterbitkan 01/03/2026

Kata kunci:

Ketimpangan sosial

Kekuasaan

Teori konflik

Mekanisme reproduksi

Masyarakat modern

Keywords:

Social inequality

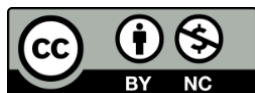
Power

Conflict theory

Reproduction mechanisms

Modern society

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Penulis Korespondensi

Fina Maghfiroh

Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid

Email: mghfrhfina@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan sosial merupakan fenomena struktural yang terus bertahan dalam masyarakat modern dan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan distribusi sumber daya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan sosial sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan yang dilegitimasi dan dipertahankan melalui berbagai institusi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis teori konflik untuk mengkaji bagaimana relasi kuasa bekerja dalam pengelolaan konflik sosial, institusi pendidikan, dan praktik hukum mikro. Hasil kajian menunjukkan bahwa stabilitas sosial sering kali bukan mencerminkan keadilan struktural, melainkan merupakan hasil dari keberhasilan kelompok dominan dalam mengelola konflik dan menormalisasi ketimpangan melalui mekanisme simbolik dan institusional yang tampak netral. Dengan demikian, ketimpangan sosial berfungsi sebagai instrumen reproduksi kekuasaan yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

Abstract

Social inequality is a persistent structural phenomenon in modern society and cannot be understood solely as a matter of resource distribution. This article aims to analyze social inequality as a mechanism for the reproduction of power, legitimized and maintained through various social institutions. This research uses a qualitative approach, employing literature review methods and conflict theory analysis, to examine how power relations operate in social conflict management, educational institutions, and microlegal practices. The results of this study indicate that social stability often does not reflect structural justice but rather results from the success of dominant groups in managing conflict and normalizing inequality through seemingly neutral symbolic and institutional mechanisms. Thus, social inequality functions as an instrument for the reproduction of power, systematically and sustainably occurring.

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial merupakan fenomena struktural yang tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Ketimpangan tidak sekadar menunjukkan perbedaan kondisi ekonomi antarindividu, melainkan mencerminkan distribusi kekuasaan yang timpang dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kajian sosiologi konflik, ketimpangan dipahami sebagai konsekuensi dari relasi kuasa yang dilembagakan melalui institusi sosial, sehingga menolak pandangan bahwa ketimpangan muncul secara alamiah atau semata-mata disebabkan oleh perbedaan kemampuan individu (Zulfiani & Farhana, 2022).

Perspektif konflik menempatkan ketimpangan sebagai bagian inheren dari struktur masyarakat yang ditandai oleh pertentangan kepentingan dan posisi sosial. Berbeda dengan pendekatan fungsionalisme yang menekankan konsensus dan stabilitas, teori konflik memandang konflik sebagai kondisi normal dalam masyarakat yang majemuk. Konflik justru menjadi indikator adanya ketimpangan yang terlembaga, karena muncul dari distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata antarindividu maupun kelompok sosial (Sepang, 2020). Kajian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menempatkan ketimpangan sosial sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan dengan pendekatan kontekstual Indonesia.

Karl Marx menjelaskan bahwa ketimpangan sosial berakar pada sistem produksi kapitalis yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang saling berkonflik. Kelas pemilik alat produksi menempati posisi dominan karena memiliki kendali atas tenaga kerja dan hasil produksi, sementara kelas pekerja berada dalam posisi subordinat. Relasi produksi yang timpang tersebut melahirkan eksploitasi struktural yang direproduksi secara berkelanjutan melalui sistem ekonomi dan hukum yang berpihak pada kepentingan kelas berkuasa (Marx, 2004).

Namun, ketimpangan sosial tidak hanya bersumber dari kepemilikan ekonomi. Max Weber memperluas analisis kekuasaan dengan menekankan bahwa kekuasaan bekerja melalui dimensi kelas, status sosial, dan partai. Kekuasaan dipahami sebagai kemampuan aktor sosial untuk memaksakan kehendaknya dalam suatu hubungan sosial, bahkan ketika menghadapi resistensi. Kekuasaan tersebut memperoleh legitimasi melalui jabatan, birokrasi, dan otoritas formal yang diakui secara hukum, sehingga memungkinkan dominasi berlangsung secara sistemik dan sah (Ardila et al., 2023). Ketimpangan sosial juga dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan dan tata kelola negara yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial, sehingga kelompok rentan tetap berada pada posisi subordinat dalam struktur sosial (Nasiwan & Wahyuni, 2024).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ralf Dahrendorf menegaskan bahwa masyarakat modern tersusun atas relasi dominasi antara kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang berada dalam posisi subordinat. Ketimpangan sosial lahir dari distribusi otoritas yang tidak merata dalam struktur sosial, sehingga konflik tidak semata-mata bersumber dari kepemilikan ekonomi, melainkan dari ketimpangan kekuasaan yang terlembaga dalam institusi sosial dan politik (Adanti et al., 2025).

Dalam konteks masyarakat modern, dinamika kekuasaan semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem politik dan birokrasi negara. Kekuasaan politik memiliki peran strategis dalam menentukan distribusi sumber daya dan akses terhadap kebijakan publik. Ketika kekuasaan terpusat pada kelompok elite, proses pengambilan keputusan cenderung bersifat eksklusif dan memperkuat dominasi kelompok tertentu, sehingga ketimpangan sosial tidak hanya tercermin dalam perbedaan ekonomi, tetapi juga dalam ketimpangan akses terhadap ruang partisipasi politik (Panjaitan, 2024).

Ketimpangan sosial yang dihasilkan dari relasi kuasa tersebut tidak bersifat statis, melainkan direproduksi secara berkelanjutan melalui mekanisme sosial dan politik yang tampak netral. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas praktik sosial (*das sein*). Kekuasaan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan justru berubah menjadi alat akumulasi kepentingan elite, sehingga memperkuat dominasi struktural dan melemahkan posisi kelompok masyarakat rentan (Ardila et al., 2023; Yogita & Hafis, 2017).

Dalam perspektif konflik sosial kontemporer, stabilitas yang terjaga dalam masyarakat yang timpang sering kali bukan hasil dari keadilan struktural, melainkan akibat keberhasilan kelompok dominan dalam mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi perlawanan terbuka. Konflik yang lahir dari ketimpangan kerap dilembagakan sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai saluran katarsis sosial tanpa mengubah struktur kekuasaan yang mendasar (Zulain, 2019). Ketika ketimpangan dipersepsikan sebagai tidak adil dan tidak dapat dinegosiasikan melalui mekanisme sosial yang sah, konflik sosial menjadi tidak terhindarkan dan berpotensi melemahkan kohesi sosial (Zulain, 2019).

Dengan demikian, ketimpangan sosial dalam masyarakat modern dapat dipahami sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan yang bekerja secara struktural dan multidimensional. Kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui dominasi ekonomi atau politik secara langsung, tetapi juga melalui pengelolaan konflik, pembentukan kebijakan publik, serta legitimasi sosial yang membuat relasi timpang diterima sebagai sesuatu yang wajar. Integrasi teori konflik Marx, Weber, dan Dahrendorf, serta kajian konflik sosial kontemporer menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar persoalan distribusi sumber daya, melainkan bagian dari proses sosial yang mempertahankan dan mereproduksi kekuasaan dalam struktur masyarakat modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan sosial sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan dalam struktur masyarakat modern, dengan menempatkan konteks sosial Indonesia sebagai kerangka analisis utama. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan direproduksi melalui struktur sosial, institusi negara, dan praktik budaya dalam masyarakat modern Indonesia.

Artikel ini menawarkan kebaruan teoretis dengan menganalisis struktur sosial dan ketimpangan sosial sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan dalam konteks masyarakat modern Indonesia. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung mengadopsi teori-teori Barat secara langsung, artikel ini mengintegrasikan teori konflik klasik dan teori kekuasaan modern dengan mempertimbangkan faktor historis, peran negara, serta dinamika budaya lokal. Pendekatan ini menempatkan ketimpangan sosial tidak semata-mata sebagai akibat pembangunan, melainkan sebagai proses struktural yang direproduksi secara sistemik melalui relasi kekuasaan politik, ekonomi, dan simbolik dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Berbagai kajian telah membahas ketimpangan sosial dari beragam perspektif, namun pendekatan yang digunakan masih menunjukkan keterbatasan tertentu. Kajian mengenai pemerataan ekonomi cenderung menempatkan ketimpangan sosial sebagai persoalan distribusi material, sementara dimensi relasi kekuasaan dan mekanisme reproduksi ketimpangan dalam struktur sosial belum menjadi fokus utama analisis (Habib et al., 2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian teoretis berbasis studi pustaka. Data diperoleh melalui penelusuran dan telaah kritis terhadap literatur ilmiah berupa buku teks klasik dan kontemporer sosiologi, artikel jurnal nasional dan internasional, serta sumber akademik lain yang relevan dengan tema ketimpangan sosial, kekuasaan, dan struktur sosial masyarakat modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan seleksi sumber pustaka yang memiliki relevansi teoritis dan kontekstual dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan menelaah konsep, argumentasi, dan relasi antar teori yang digunakan dalam menjelaskan mekanisme reproduksi kekuasaan.

Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori konflik klasik dan kontemporer untuk membangun kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai ketimpangan sosial. Pendekatan kontekstual digunakan untuk menempatkan analisis dalam realitas masyarakat Indonesia, sehingga interpretasi terhadap struktur sosial dan relasi kekuasaan tidak bersifat ahistoris maupun ahomogen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana ketimpangan sosial direproduksi melalui struktur, institusi, dan praktik sosial dalam masyarakat modern.

Pendekatan kajian teoretis dipilih karena penelitian ini bertujuan membangun pemahaman konseptual dan sintesis teori dalam menjelaskan mekanisme reproduksi kekuasaan, bukan untuk menguji hipotesis empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis secara kritis dan kontekstual guna menjelaskan dinamika ketimpangan sosial dalam struktur masyarakat modern Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Teori dan Konsep Dasar

Dalam kajian sosiologi konflik, kekuasaan dipahami sebagai elemen fundamental yang membentuk struktur sosial dan menentukan pola relasi antar kelompok dalam masyarakat. Ralf Dahrendorf memandang masyarakat modern sebagai arena relasi dominasi antara kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang berada pada posisi subordinat. Perbedaan posisi ini secara inheren melahirkan konflik sosial yang bersumber dari distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga konflik tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial itu sendiri (Adanti et al., 2025).

Berbeda dari perspektif fungsionalisme yang menekankan stabilitas dan konsensus, teori konflik Dahrendorf menegaskan bahwa ketegangan antara otoritas dan subordinasi justru menjadi penggerak perubahan sosial. Kekuasaan tidak dipahami sebagai atribut individual semata, melainkan sebagai relasi struktural yang terlembaga dalam institusi politik, ekonomi, dan sosial. Kelompok yang memiliki otoritas menggunakan kekuasaan tersebut untuk menetapkan aturan, norma, dan kebijakan yang menguntungkan posisinya, sementara kelompok subordinat berada dalam posisi menyesuaikan diri terhadap struktur yang telah dibentuk (Adanti et al., 2025).

Dalam konteks ini, kekuasaan politik menjadi instrumen paling menentukan dalam pembentukan ketimpangan sosial. Kekuasaan politik memungkinkan elite untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan publik, distribusi sumber daya, serta arah kebijakan negara. Ketika kekuasaan terpusat pada kelompok tertentu, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat eksklusif dan tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat secara luas. Akibatnya, dominasi elite semakin menguat, sementara ruang partisipasi kelompok subordinat semakin menyempit (Adanti et al., 2025).

Distribusi kekuasaan yang timpang tersebut berimplikasi langsung pada munculnya ketimpangan sosial dalam berbagai sektor kehidupan. Ketimpangan tidak hanya tampak pada aspek ekonomi, seperti perbedaan pendapatan dan akses kerja, tetapi juga dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan hak politik. Kelompok yang menguasai kekuasaan memperoleh akses lebih besar terhadap sumber daya dan fasilitas sosial, sedangkan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan mengalami keterbatasan struktural yang berujung pada marginalisasi (Adanti et al., 2025).

Ketimpangan sosial juga termanifestasi secara spesifik dalam relasi gender. Ketimpangan gender merupakan bentuk ketimpangan sosial yang berakar pada struktur kekuasaan patriarkal, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan pengambil keputusan, sementara perempuan diposisikan dalam peran subordinat. Struktur patriarki tidak terbentuk secara alamiah, melainkan dikonstruksi secara sosial dan dilembagakan melalui norma, nilai, serta praktik budaya yang diwariskan lintas generasi (Wulansari et al., 2025).

Dalam kerangka ini, gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang menentukan pembagian peran, hak, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Norma patriarkal membatasi perempuan pada ranah domestik, sementara laki-laki dilegitimasi untuk menguasai ruang publik, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Pola pembagian peran tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan sosial dilembagakan melalui struktur gender yang timpang (Wulansari et al., 2025).

Ketimpangan gender sebagai struktur kekuasaan sosial tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, sumber daya ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa patriarki berfungsi sebagai mekanisme struktural yang mempertahankan dominasi satu gender atas gender lainnya, sekaligus mereproduksi ketimpangan sosial secara sistemik pada tingkat individu, institusional, dan kultural (Wulansari et al., 2025).

Selain bekerja melalui struktur sosial dan institusi formal, kekuasaan juga direproduksi melalui budaya. Budaya berperan sebagai sistem nilai, norma, dan simbol yang mengatur cara pandang masyarakat terhadap relasi sosial. Dalam konteks Indonesia, budaya patriarki berfungsi sebagai struktur ideologis yang melegitimasi dominasi laki-laki dan menormalisasi ketimpangan gender. Ketimpangan tidak dipersepsi sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai tatanan sosial yang dianggap wajar dan alamiah (Agustina et al., 2025).

Budaya patriarki direproduksi melalui proses sosialisasi sejak dini, terutama dalam institusi keluarga. Pembagian peran domestik yang timpang di mana perempuan diposisikan sebagai pengelola rumah tangga dan laki-laki sebagai pengendali ekonomi merefleksikan internalisasi nilai budaya yang menempatkan kekuasaan pada pihak laki-laki. Pola ini tidak hanya mencerminkan relasi kuasa, tetapi juga memastikan keberlanjutan dominasi tersebut lintas generasi (Agustina et al., 2025).

Lebih jauh, institusi pendidikan dan media massa turut berperan dalam mereproduksi budaya patriarki melalui representasi simbolik yang bias gender. Stereotip perempuan sebagai makhluk lemah dan emosional, serta laki-laki sebagai aktor rasional dan pemimpin, memperkuat batasan partisipasi perempuan dalam ranah publik. Selain itu, tafsir adat dan agama yang patriarkal kerap digunakan untuk melegitimasi superioritas laki-laki, sehingga kontrol terhadap tubuh, peran sosial, dan hak perempuan terus dipertahankan (Agustina et al., 2025).

Dengan demikian, kekuasaan, ketimpangan sosial, gender, dan budaya merupakan konsep yang saling terkait dalam kerangka teori konflik. Ketimpangan tidak dapat dipahami sebagai fenomena individual atau alamiah, melainkan sebagai hasil dari relasi kuasa yang dilembagakan melalui struktur sosial, institusi, dan budaya. Analisis ini menjadi fondasi

teoretis penting untuk memahami bagaimana ketimpangan sosial direproduksi dan dipertahankan dalam masyarakat modern, khususnya dalam konteks Indonesia.

3.2. Mekanisme Reproduksi Kekuasaan dalam Struktur Sosial

Mekanisme reproduksi kekuasaan dalam struktur sosial merujuk pada serangkaian proses sosial yang memungkinkan relasi kuasa dan ketimpangan sosial terus dipertahankan serta diwariskan secara lintas generasi. Struktur sosial tidak hanya membentuk pola hubungan antarindividu dan kelompok, tetapi juga berfungsi sebagai medium distribusi kekuasaan yang tidak merata. Dalam masyarakat modern, reproduksi kekuasaan tidak terutama berlangsung melalui dominasi koersif, melainkan melalui mekanisme simbolik, institusional, dan kultural yang bekerja secara laten dan dilegitimasi sebagai sesuatu yang wajar (Kusmanto & Elizabeth, 2018).

Ketimpangan sosial yang terlembagakan dalam struktur sosial memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial. Distribusi kekuasaan dan sumber daya yang timpang melahirkan relasi dominasi antara kelompok superordinat dan subordinat yang bersifat struktural. Dalam perspektif teori konflik, kondisi ini menjadikan konflik sosial bukan sebagai penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari struktur sosial yang tidak adil. Ketika ketimpangan dipersepsikan sebagai tidak adil dan tidak dapat dinegosiasikan melalui mekanisme sosial yang sah, integrasi sosial melemah dan stabilitas masyarakat berada dalam kondisi yang rapuh (Zuldin, 2019).

Namun demikian, konflik yang muncul akibat ketimpangan tidak selalu bersifat destruktif. Dalam kerangka teori konflik, konflik dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap struktur sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, konflik sering kali dikelola dan dilembagakan oleh kelompok dominan sedemikian rupa sehingga tidak mengubah struktur kekuasaan secara mendasar. Konflik diarahkan menjadi saluran katarsis sosial yang terkontrol, sehingga ketimpangan tetap bertahan dan stabilitas sosial tercipta melalui pengelolaan konflik, bukan melalui transformasi struktural yang adil. Dengan demikian, stabilitas sosial justru berfungsi sebagai instrumen reproduksi kekuasaan (Zuldin, 2019).

Selain melalui pengelolaan konflik, mekanisme reproduksi kekuasaan bekerja secara efektif melalui institusi pendidikan. Pendidikan tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga nilai, norma, dan simbol budaya yang merepresentasikan kepentingan kelompok dominan. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, pendidikan beroperasi melalui mekanisme kekerasan simbolik, yakni bentuk dominasi halus yang bekerja melalui bahasa, kurikulum, standar penilaian, dan praktik pedagogis yang dilegitimasi sebagai sah dan objektif. Mekanisme ini menyebabkan modal budaya kelompok dominan diakui sebagai standar universal, sementara modal budaya kelompok subordinat terpinggirkan (Siswadi, 2024).

Kurikulum dan materi ajar yang dilembagakan dalam pendidikan formal cenderung merefleksikan perspektif elit dan mengabaikan pengalaman sosial kelompok marginal. Akibatnya, pendidikan tidak sepenuhnya berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial, melainkan menjadi mekanisme pewarisan ketimpangan antargenerasi. Relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik, yang dinormalisasi melalui praktik evaluasi dan disiplin, memperkuat dominasi simbolik serta melemahkan posisi struktural kelompok subordinat dalam jangka panjang (Siswadi, 2024).

Akses pendidikan seringkali dipandang sebagai instrumen utama untuk mobilitas sosial dalam masyarakat modern, namun ketimpangan akses terhadap pendidikan justru dapat memperlebar jurang status sosial antara kelompok yang memiliki privilese dan mereka yang termarginalkan, karena pendidikan yang tidak merata mencegah kelompok subordinat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki posisi sosialnya (Alpi Zaidah & Parozak, 2025). Kajian kritis menunjukkan bahwa pendidikan yang idealnya berperan sebagai sarana mobilitas sosial pada kenyataannya sering memperkuat struktur kelas yang sudah ada,

terutama ketika tersendat oleh ketimpangan akses pendidikan tinggi dan pekerjaan, sehingga sistem pendidikan cenderung mereproduksi ketimpangan dan memperdalam status sosial yang telah terbentuk (Hutabarat & Pangaribuan, 2025).

Reproduksi kekuasaan juga tampak jelas dalam praktik hukum mikro, yakni pada proses penegakan hukum sehari-hari di tingkat implementasi. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, ketimpangan gender sering kali tidak bersumber dari norma hukum tertulis, melainkan dari praktik peradilan yang bias dan formalistik. Pembagian harta bersama pasca perceraian, misalnya, menunjukkan bahwa perempuan kerap dirugikan karena mekanisme pembuktian lebih mengakui kepemilikan administratif dibandingkan kontribusi domestik yang bersifat non-finansial (Raden dkk., 2025).

Struktur hukum mikro bekerja melalui prosedur, penilaian hakim, dan forum mediasi yang secara tidak langsung memperkuat relasi kuasa patriarkal. Perempuan dengan literasi hukum rendah serta tekanan sosial yang kuat cenderung menerima kesepakatan yang merugikan dirinya demi menjaga harmoni sosial. Dalam kerangka relasi kuasa, praktik hukum semacam ini berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan yang menormalisasi ketimpangan, sehingga subjek hukum menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang alamiah dan sah (Raden dkk., 2025).

Ketimpangan sosial turut mempengaruhi akses masyarakat terhadap sistem peradilan, di mana kelompok miskin dan kurang berpendidikan mengalami hambatan dalam memperoleh hak hukum, sehingga marginalisasi dalam sistem hukum mencerminkan reproduksi relasi kekuasaan yang timpang dan memperdalam posisi subordinat dalam struktur sosial (Subhan et al., 2025). Upaya hukum dalam mengatasi kesenjangan sosial menghadapi tantangan struktural karena ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan serta layanan publik turut menghambat penegakan keadilan, sehingga hukum itu sendiri dapat berfungsi sebagai instrumen reproduksi kekuasaan jika implementasinya tidak adil dan tidak inklusif (Makmur et al., 2024).

Dalam perspektif teori konflik, pendidikan tidak dipandang sekadar sebagai manfaat sosial tetapi sebagai instrumen yang menegaskan dominasi kelompok elite, karena sekolah dapat membentuk keterampilan, nilai, dan sikap yang mengukuhkan posisi sosial tertentu sehingga struktur kekuasaan tetap terjaga (Mishra, 2023).

Lebih lanjut, ketimpangan sosial yang direproduksi melalui institusi pendidikan dan hukum diperkuat oleh distribusi sumber daya ekonomi dan politik yang tidak setara. Akses yang timpang terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya ekonomi memungkinkan kelompok yang memiliki modal ekonomi dan politik besar mempertahankan keunggulan strukturalnya. Sementara itu, kelompok miskin dan marginal terus terjebak dalam keterbatasan akses dan peluang sosial, sehingga mobilitas sosial terhambat dan ketimpangan bersifat sistemik serta berulang (Rahmadani dkk., 2025).

Dalam perspektif teori konflik Marxian, negara dan hukum berfungsi sebagai instrumen kelas dominan untuk mempertahankan kepentingannya. Distribusi kekuasaan yang timpang memungkinkan kelas penguasa mengontrol alat produksi, kebijakan publik, serta institusi sosial, sehingga struktur sosial bekerja untuk melanggengkan dominasi kelas tertentu. Ketimpangan dalam konteks ini bukanlah anomali, melainkan bagian inheren dari sistem sosial itu sendiri (Diva Raya dkk., 2024).

Dengan demikian, mekanisme reproduksi kekuasaan dalam struktur sosial bekerja secara multidimensional melalui pengelolaan konflik, institusi pendidikan, praktik hukum mikro, serta distribusi sumber daya ekonomi dan politik. Ketimpangan sosial tidak direproduksi melalui paksaan terbuka, melainkan melalui legitimasi simbolik dan normalisasi praktik sosial yang tampak netral. Stabilitas sosial yang dihasilkan dari mekanisme ini bukanlah cerminan keadilan struktural, melainkan hasil dari keberhasilan sistem sosial mempertahankan dominasi kelompok berkuasa secara berkelanjutan.

3.3. Struktur Sosial dan Konteks Modern

Struktur sosial dapat dipahami sebagai pola hubungan sosial yang relatif stabil, teratur, dan berlangsung dalam jangka waktu panjang di antara unsur-unsur masyarakat. Pola tersebut terbentuk melalui interaksi sosial yang berulang, sehingga menghasilkan keteraturan perilaku yang dapat dikenali dan dipertahankan dalam kehidupan bersama. Dalam kerangka ini, struktur sosial berfungsi sebagai sistem pengatur relasi antarindividu maupun antarkelompok sosial, yang sekaligus membatasi dan mengarahkan tindakan sosial para anggotanya (Kusmanto & Elizabeth, 2018).

Struktur sosial memiliki kekuatan yang bersifat eksternal terhadap individu, tetapi secara nyata memengaruhi perilaku sosial. Individu tidak sepenuhnya bebas dalam bertindak karena tindakan mereka diarahkan oleh norma, nilai, dan institusi sosial yang telah terlembagakan. Akibatnya, perilaku sosial cenderung bersifat seragam dan dapat diprediksi sesuai dengan posisi individu dalam struktur sosial tertentu (Kusmanto & Elizabeth, 2018). Dengan demikian, struktur sosial bekerja sebagai kerangka objektif yang membentuk kemungkinan dan batasan tindakan sosial.

Konsep struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial. Sistem sosial merujuk pada keseluruhan interaksi fungsional antara individu, kelompok, dan institusi yang saling bergantung untuk mempertahankan keteraturan sosial. Dalam perspektif ini, struktur sosial dipahami sebagai aspek statis dari sistem sosial, sementara interaksi dan proses sosial merupakan aspek dinamis yang secara terus-menerus mereproduksi struktur tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Kusmanto & Elizabeth, 2018).

Dalam masyarakat modern, sistem sosial berkembang semakin kompleks seiring dengan diferensiasi peran, pembagian kerja, serta pertumbuhan institusi formal. Modernitas mendorong terbentuknya tatanan sosial yang lebih rasional, terorganisasi, dan berbasis fungsi. Namun, kompleksitas ini juga meningkatkan ketergantungan antarunsur sosial serta memperkuat mekanisme kontrol struktural terhadap individu, sehingga struktur sosial modern cenderung lebih terlembagakan dan mengikat (Kusmanto & Elizabeth, 2018).

Pembentukan struktur sosial dalam masyarakat modern berlangsung secara bertahap dan evolutif. Struktur tersebut terbentuk melalui hubungan timbal balik antarindividu dan kelompok, pengulangan pola perilaku sosial, serta pelembagaan norma dan nilai yang menjadi pedoman tindakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial merupakan hasil konstruksi sosial yang terus direproduksi melalui praktik sosial sehari-hari, bukan sesuatu yang bersifat alamiah atau statis (Kusmanto & Elizabeth, 2018).

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, masyarakat modern dapat dipahami sebagai ruang sosial yang terdiri atas berbagai arena (*field*) tempat agen-agen sosial berkompetisi berdasarkan kepemilikan modal yang tidak seimbang. Modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik menentukan posisi objektif agen dalam struktur sosial. Arena pendidikan, dalam hal ini, beroperasi melalui mekanisme simbolik yang menjadikan nilai dan budaya kelompok dominan sebagai standar yang dianggap sah dan netral (Karnanta, 2013).

Kurikulum, bahasa pengantar, dan sistem evaluasi dalam pendidikan formal merefleksikan modal kultural tertentu yang tidak dimiliki secara merata oleh seluruh peserta didik. Kondisi ini menyebabkan struktur sosial modern direproduksi secara halus melalui praktik pendidikan yang tampak objektif, tetapi sesungguhnya bias terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan menjadi cerminan bagaimana struktur sosial bekerja secara sistemik dalam konteks modern (Karnanta, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial dalam konteks modern merupakan konstruksi sosial yang dinamis, tetapi tidak egaliter. Struktur sosial dibentuk dan direproduksi melalui distribusi modal yang tidak merata serta melalui institusi pendidikan sebagai arena kunci. Pemahaman ini menegaskan bahwa ketimpangan sosial

bukan sekadar akibat perbedaan individual, melainkan hasil dari mekanisme struktural yang bekerja secara sistemik dalam masyarakat modern.

3.4. Dimensi Tambahan dan Penguat Analisis

Dimensi tambahan dalam analisis ini menunjukkan bahwa reproduksi kekuasaan tidak hanya berlangsung melalui struktur politik, hukum, dan institusi formal, tetapi juga melalui konstruksi sosial yang membentuk identitas dan posisi individu dalam masyarakat. Identitas gender dan struktur ekonomi modern merupakan dua arena penting yang memperlihatkan bagaimana ketimpangan sosial direproduksi secara simbolik, kultural, dan material. Melalui kedua dimensi ini, kekuasaan bekerja secara halus dengan membentuk kesadaran, praktik sosial, serta penerimaan individu terhadap relasi yang timpang.

Reproduksi kekuasaan dalam identitas gender memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif konstruksi sosial, identitas gender dibentuk melalui proses sosial yang melibatkan norma budaya, institusi, dan relasi kuasa. Mulyanto (2025) menegaskan bahwa pembentukan identitas gender berlangsung melalui mekanisme eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana dikemukakan oleh Berger dan Luckmann. Pandangan sosial mengenai maskulinitas dan feminitas diekspresikan dalam praktik sehari-hari, dilembagakan sebagai realitas yang dianggap wajar, dan kemudian diinternalisasi oleh individu sebagai bagian dari identitas diri mereka (Mulyanto, 2025).

Proses ini melahirkan berbagai bentuk bias gender, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan kekerasan berbasis gender. Bias-bias tersebut tidak semata-mata muncul dari sikap individual, melainkan merupakan produk struktur sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dominan. Konstruksi perempuan sebagai pihak yang lemah atau kurang rasional berfungsi sebagai legitimasi simbolik bagi pembatasan akses perempuan terhadap sumber daya strategis, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan ruang politik (Mulyanto, 2025).

Lebih jauh, reproduksi kekuasaan berbasis gender juga beroperasi dalam ranah sosial dan politik. Meskipun secara normatif perempuan memiliki hak politik yang setara, praktik sosial patriarkal sering kali membatasi partisipasi politik perempuan secara substantif. Budaya politik yang didominasi laki-laki menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga keterwakilan perempuan cenderung bersifat formal dan belum mampu menantang struktur kekuasaan yang mapan (Mulyanto, 2025). Dalam konteks ini, kekuasaan simbolik berperan penting dalam mempertahankan ketimpangan melalui penerimaan sosial terhadap relasi gender yang timpang.

Selain identitas gender, ketimpangan dalam ekonomi modern juga menjadi dimensi penguat analisis reproduksi kekuasaan. Modernisasi ekonomi tidak serta-merta menghapus ketimpangan, melainkan justru menciptakan bentuk ketimpangan baru melalui penguatan sektor formal dan marginalisasi sektor informal. Seruni dan Soemantri (2018) menunjukkan bahwa sektor ekonomi informal tetap menjadi bagian integral dari ekonomi modern, terutama di negara berkembang, namun para pelakunya berada dalam posisi struktural yang rentan karena keterbatasan akses terhadap modal, pasar, dan institusi formal (Seruni & Soemantri, 2018: 76–77).

Dalam konteks sektor informal, seperti aktivitas pemulung dalam industri daur ulang, ketimpangan ekonomi tercermin dalam relasi produksi yang hierarkis. Pemulung menempati posisi paling bawah dalam rantai ekonomi, sementara aktor di tingkat atas menguasai sumber daya strategis dan menentukan harga serta distribusi keuntungan. Ketimpangan ini tidak hanya bersumber dari perbedaan kepemilikan material, tetapi juga dari eksklusi struktural

terhadap institusi formal yang menjadi prasyarat utama dalam ekonomi modern (Seruni & Soemantri, 2018).

Reproduksi kekuasaan dalam ekonomi modern juga berlangsung melalui relasi patron klien yang mengikat pelaku ekonomi informal dalam ketergantungan jangka panjang. Meskipun relasi tersebut memberikan jaminan hidup minimum, pada saat yang sama ia membatasi mobilitas ekonomi dan memperkuat posisi dominan aktor ekonomi di tingkat atas. Minimnya peran negara dalam menjangkau sektor informal semakin memperkuat ketimpangan, karena kebijakan ekonomi dan perlindungan sosial lebih berorientasi pada sektor formal (Seruni & Soemantri, 2018).

Dengan demikian, dimensi identitas gender dan ekonomi modern memperkuat analisis bahwa reproduksi kekuasaan bersifat multidimensional. Ketimpangan sosial tidak hanya direproduksi melalui kontrol material dan institusional, tetapi juga melalui kekuasaan simbolik yang membentuk kesadaran, identitas, dan penerimaan sosial terhadap relasi yang timpang. Dimensi ini menegaskan bahwa kekuasaan bertahan bukan semata-mata melalui paksaan, melainkan melalui normalisasi sosial yang membuat ketimpangan diterima sebagai sesuatu yang sah dan wajar dalam masyarakat modern.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial dalam masyarakat modern tidak hanya merupakan konsekuensi dari distribusi sumber daya yang tidak merata, tetapi berfungsi sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan yang dilembagakan secara sistematis. Melalui pengelolaan konflik sosial, institusi pendidikan, dan praktik hukum mikro, relasi dominasi dipertahankan dan dilegitimasi dalam struktur sosial yang tampak stabil dan netral. Konflik tidak dihilangkan, melainkan dikelola agar tidak berkembang menjadi transformasi struktural yang mengancam posisi kelompok dominan.

Institusi pendidikan berperan dalam mereproduksi ketimpangan melalui kekuasaan simbolik yang mengafirmasi modal budaya kelompok dominan, sementara praktik hukum sehari-hari sering kali memperkuat relasi kuasa yang timpang melalui prosedur formal dan bias implementatif. Temuan ini menegaskan bahwa stabilitas sosial tidak selalu identik dengan keadilan, melainkan dapat menjadi indikator keberhasilan sistem sosial dalam mempertahankan dominasi secara halus dan berkelanjutan.

Dengan menempatkan ketimpangan sosial sebagai proses sosial-politik yang terstruktur, artikel ini memperluas perspektif teori konflik dalam memahami hubungan antara ketimpangan dan kekuasaan. Kajian ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi strategi transformasi struktural yang tidak hanya berfokus pada pemerataan ekonomi, tetapi juga pada pembongkaran mekanisme institusional yang mereproduksi ketimpangan dalam masyarakat modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adanti, E., Habibah, J. N., Hilya, M. Z. N., Saputro, Z. A., Hufad, A., & Achdiani, Y. (2025). Teori konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai sumber ketimpangan sosial. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1).
- Agustina, D., Damanik, F. A., Ramadhayanti, S., Kirana, S., Harahap, D. N., Sipahutar, A. N. A., Annisa, F., & Azzahrah, S. H. (2025). Budaya patriarki sebagai fondasi ketimpangan gender di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2).

- Alpi Zaidah, & Parozak, M. R. G. (2025). Mobilitas sosial dan ketimpangan: Kajian tentang akses pendidikan sebagai instrumen perubahan status. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. 4(5).
- Ardila, I., Yulianti, Fauziah, D. A., Putri, K. R., Firnanda, A., & Hardiansyah, M. A. (2023). Penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan korupsi bantuan sosial oleh pejabat publik perspektif Max Weber. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 13(2).
- Diva Raya, dkk. (2024). Sumber kekuasaan dalam negara: Analisis berdasarkan teori konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. 3(2).
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*. 1(4).
- Hutabarat, D., & Pangaribuan, C. S. (2025). Paradoks teori pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dalam ketimpangan pendidikan dan tantangan kerja generasi Z di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Karnanta, K. Y. (2013). Paradigma teori arena produksi kultural sastra: Kajian terhadap pemikiran Pierre Bourdieu. *Jurnal Poetika*. 1(1).
- Kusmanto, T. Y., & Elizabeth, M. Z. (2018). Struktur dan sistem sosial pada aras wacana dan praksis. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*. 2(1).
- akmur, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Tantangan hukum dalam mengatasi kesenjangan sosial. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Marx, K. (2004). *Kapital: Sebuah kritik ekonomi politik Jilid I* (Terjemahan Indonesia). Jakarta: Hasta Mitra.
- Mishra, S. (2023). *Educational Significance of Conflict Theory*. Pedagogy of Learning, 1(1).
- Mulyanto, M. R. (2025). Reproduksi kekuasaan dalam identitas gender: Sebuah analisis teoritis terhadap hubungan sosial dan politik. *Jurnal Pemikiran IMM*. 1(1).
- Nasiwan, & Wahyuni, Y. S. (2024). *Teori-teori sosial Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD Press).
- Panjaitan, J. (2024). Dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. Universitas Medan Area.
- Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam pembagian harta gono-gini: Kajian sosio-legal atas putusan perceraian di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1).
- Rahmadani, A. A., dkk. (2025). Problem ketimpangan sosial di masyarakat. *Jurnal Lentera Ilmu*. 1(1).
- Sepang, I. V. (2020). *Modul sosiologi kelas xi kd 3.4 dan 4.4: konflik sosial dan resolusi konflik*. Tomohon: SMA Kristen 1 Tomohon.
- Seruni, M. P., & Soemantri, R. (2018). Relasi kekuasaan dalam sektor informal: Studi kasus lapak pemulung di Kademangan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. 5(2).
- Siswadi, G. A. (2024). Reproduksi kekuasaan melalui kekerasan simbolik dalam sistem pendidikan: Analisis kritis pemikiran Pierre Bourdieu. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*. 29(1).
- Subhan, D., Satriyani, D., Arianti, D., Ramdhana, M. A., & Massunna, M. W. (2025). Ketimpangan sosial dan akses terhadap keadilan hukum di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. 4(5).

- Wulansari, A. S., Az-zahra, R. A. A., Maulina, R. A., Agustin, V., & Supriyono. (2025). Patriarki dan ketimpangan sosial: Tantangan realisasi nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 9(3).
- Yogia, M. A., & Hafis, R. I. A. (2017). Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*. 8(2).
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: Kajian atas teori sosial kontemporer. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*. 2(1).
- Zulfiani, D., & Farhana, N. (2022). Teori konflik Karl Marx dan relevansinya terhadap ketimpangan sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. 16(1).